

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum tahun 2019 merupakan pemilu serentak yang pertama kali dilakukan di Indonesia untuk memilih calon anggota legislatif sekaligus juga memilih calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk periode lima tahun kedepan, sesuai dengan undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Terdapat 16 partai politik nasional peserta pemilu serta 4 partai politik lokal. Berdasarkan situs Web KPU RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan partai politik peserta pemilu yang berjumlah 20 partai, yakni 16 partai politik nasional peserta pemilu dan ada 4 partai politik lokal (KPU RI, 2019). Dari jumlah peserta partai politik tersebut terdapat empat partai pendatang baru untuk pemilu 2019. Empat partai tersebut yaitu Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Gerindra), (Hanafi, 2018). Partai pendatang baru tersebut termasuk kedalam partai politik nasional sama seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PDIP Golkar, Nasdem, PKS, PPP, PAN Hanura, Demokrat, PBB dan PKPI. Kemudian empat partai lokal diantaranya Partai Aceh, SIRA, PD Aceh dan juga PNA (KPU RI, 2019).

Kemunculan partai baru dalam Pemilu 2019 bukan merupakan fenomena pertama kali sejak era reformasi. Masuknya partai politik baru dalam pemilu 2019 membuat ruang persaingan semakin sengit karena akan menyebabkan perebutan pasar pemilih. Partai pendatang baru pada pemilu akan bersaing dengan partai lama yang mana partai lama cenderung sudah bisa mempertahankan eksistensinya pada pemilu yang sudah dibuktikan

melalui keberhasilan mereka dalam memperoleh kursi di parlemen (Hanafi, 2018). Maka dari itu, untuk memenangkan kompetisi di ajang pemilu para peserta partai politik saling bersaing antara satu dengan lainnya dengan mengaplikasikan berbagai strategi komunikasi politik. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh partai politik kepada masyarakat sangatlah di perlukan, karena masyarakat merupakan sumber keberhasilan dari suatu strategi yang dilakukan oleh partai politik. Selain itu masyarakat juga sangat berperan penting dalam perolehan hasil suara yang diperoleh partai politik dalam pemilihan umum. Komunikasi politik sebagai bagian dari system politik merupakan satu konsepsi yang menyatakan bahwa semua gejala sosial, termasuk gejala komunikasi dan politik, adalah saling berhubungan dan saling mempengaruhi (Aminulloh, 2010).

Fenomena menarik dalam ajang pemilu yaitu terdapatnya pendatang baru. Dalam hal ini pendatang baru mampu bersaing dalam pileg di pemilu 2019. Pendatang baru mampu merebut suara hati rakyat dan mampu meraih kursi di DPR RI. Hal tersebut, dikarenakan pendatang baru bisa mengalahkan petahana yang seharusnya memiliki potensi kemenangan. Hal yang menarik tentang pendatang baru adalah pendatang baru memiliki reses yang lebih bagus jika dibandingkan dengan pileg petahana. Pendatang baru memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh pileg petahana. Maka dari itu, pendatang baru mampu bersaing dalam pemilu tersebut.

Peluang petahana dalam setiap kontestasi khususnya pada pileg, memiliki peluang yang besar untuk memenangkan pemilu. Petahana selaku yang pernah menjabat sebelumnya di suatu daerah lebih di kenal masyarakat figurnya, karena pernah menjabat sebelumnya. Tingkat keterpilihan kembali petahana dalam sebuah kontestasi pileg tahun 2019 ini di tentukan oleh beberapa faktor. Namun, yang memiliki andil besar adalah

kinerjanya selama menjadi DPR-RI sebelumnya. Hal inilah yang terkadang di lupakan oleh petahana sendiri. Kinerja memiliki pengaruh besar di dalam persepsi di masyarakat, karena masyarakat sudah merasakan langsung bagaimana rasanya setelah memilih partai Gerindra yaitu Pius Lustrilanang sebagai DPR-RI Dapil NTT 1 pada pileg 2014 sebelumnya.

Petahana memiliki kesempatan menang dalam pileg lebih besar karena selama menjabat kandidat petahana dapat melakukan *soft campaign*. Kandidat petahana tentu tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat sehingga lebih mudah bagi petahana dalam pelaksanaan kampanye. Sejatinya petahana sebagai pemegang kendali kekuasaan akan mudah memenangkan pertarungan dibandingkan kandidat baru dengan keistimewaan yang dimiliki oleh petahana dan tidak dimiliki oleh kandidat baru. Namun kondisi berbeda terjadi di Dapil NTT 1, dimana dari Gerindra petahana yang mencalonkan kembali pada Pileg 2019 justru mengalami kekalahan dari kandidat yang baru.

Dalam pemilihan umum akan ada beberapa potensi yang dapat di eksplorasi dan di eksplotasi dalam sebuah petahana dalam memenangkan kontetasi pemilu tersebut. Akan tetapi pada konteks saat ini, petahana di kalahkan sama calon pendaatang baru, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan petahanannya jatuh yaitu, faktor internal dan eksternal, seperti perilaku pemilih, pengelolaan media dan pengawan suara yang berlapis. Pada pembahasan ini, penulis akan menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan jatuhnya petahana dan menangkan kandidat pendaatang baru, dengan menggunakan perspektif teori kubus kekuasaan (the power theory) dengan bertolak pada presentase atau tingkat pemilihan yang signifikan berdasarkan hasil penetapan oleh KPU.

Berdasarkan hasil pemilu serentak 2019, pada pemilihan calon presiden dan wakil presiden yaitu Jokowi dan Ma'ruf yang berbasis PDI-Perjuangan, yang mendapatkan suara

terbanyak 88.57% atau 2.368.982 suara di NTT. Sehingga pada saat Pemilihan Legislatif 2019, karena PDIP mendapatkan dukungan dari masyarakat, maka akan membawa dampak baik terhadap pileg 2019 pada suara partai dan caleg di NTT yang berbasis partai PDI-P. sedangkan Prabowo dan Sandi mendapatkan 11.43% setara dengan 305.587 suara di NTT. Perolehan suara Jokowi dan Ma'ruf mengalami kenaikan yang signifikan di NTT pada pilpres 2019. Sedangkan perolehan suara Prabowo dan Sandi mengalami penurunan yang sangat drastic di NTT, hal ini yang menyebabkan suara partai dari Gerindra menurun dan mengakibatkan suara partai pada pemilihan legislatif 2019 (m.cnnindonesia.com2019). Berikut ini presentasi caleg petahana, sebagai berikut:

Table 1.1 presentasi caleg petahana DPR RI di dapil NTT I (KPU RI. 2014-2019)

Nama Calon Petahana (2019)	Suara Sah	Partai	Nama Calon Petahana (2014)	Suara Sah	Partai
Pius Lustrilanang.	55.432	Gerindra	N. M. Dipo Nusantara P. U, SH.	40.612	PKB
Honing Sanny	49.287	GOLKAR	Dr. Andreas Hugo Pariera	91.610	PDIP
Melchias Markus Mekeng	73.120	GOLKAR	Mechias Markus Mekeng	77.564	GOLKAR
Johnny G. Plate	33.704	Nasdem	Johnny G. Plate, SE.	112.290	Nasdem
Laurens Bahang D.	79.603	PAN	Ahmad Yohan, M.Si	49.129	PAN
Dr. Benny Kabur Harman, SH	53.701	demokrat	Dr. Benny Kabur H. SH.	35.923	Demokrat

(Sumber: Diolah oleh peneliti, dari KPU RI)

Dari table di atas, telah dijelaskan bahwa caleg petahana Pius Lustrianang dari Gerindra pada tahun 2014 mendapatkan suara 55.432 dan pada tahun 2019 caleg petahana Gerindra kalah dengan pendatang baru dari PDIP. petahana yang dua kali berturut-turut

menang seharusnya mempunyai potensi menang akan tetapi kalah dengan pendatang baru. Namun kalah dan menang adalah hal biasa dalam sebuah demokrasi. Dalam pembahasan ini, akan membahas tentang Politik petahana dan menangnya kandidat baru dalam pemilihan DPR RI, khususnya di propinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini di sebabkan karena Gerindra kalah dengan pendatang baru, dari partai PDIP pada pileg 2019. Jadi dari realita politik yang terjadi pada pemilihan tersebut, penulis bermaksud meneliti tentang **“Jatuhnya Petahana dan Menangya Pendatang Baru di Pileg 2019: Studi Kasus terhadap Pius Lustrilanang (Caleg Gerindra) dan Dr. Andreas Hugo Pariera (Caleg PDIP) di Dapil NTT 1”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan yang ada di atas, penelitian ini merumuskan bahwa permasalahannya adalah petahana yang dua kali berturut-turut menang seharusnya mempunyai potensi menang akan tetapi kalah karena adanya pendatang baru. Jadi, dari realita politik yang terjadi maka penulis, tertarik untuk mengajukan pertanyaan “Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan Pius Lustrilanang sebagai petahana dan kemenangan Dr. Andreas Hugo Pariera sebagai pendatang baru di Dapil NTT 1”?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan Pius Lustrilanang sebagai petahana dan kemenangan Dr. Andreas Hugo Pariera sebagai pendatang baru di Dapil NTT 1.

D. Manfaat Penelitian

Menurut peneliti, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dibagi mejadi dua yaitu :

1. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambahkan ilmu pengetahuan dan pemikiran mengenai jatuhnya petahana serta menangnya kandidat baru dalam pemilu.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu pembaca dalam memahami jatuhnya petahana serta menangnya kandidat baru dalam pemilu, untuk dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk peneltian yang sejenisnya.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan tambahan ilmu pengetahuan khususnya untuk penelitian jatuhnya petahana dan menangnya kandidat baru dalam pemilu.

E. Tinjauan Pustaka.

Penelitian ini menggunakan 19 literatur review yang bersumber dari artikel jurnal yang berbeda-beda yang tentunya berkaitan dengan judul yang diambil peneliti. Tujuan dari analisis kajian pustaka atau literature review ini adalah memperoleh persamaan dari penelitian yang akan diteliti dan juga untuk menggali informasi guna mendapatkan perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya sehingga didapat kebaharuan dalam penelitian ini. Literatur pada penelitian ini peneliti bagi menjadi empat klasifikasi. *Pertama*, Teori Kubus Kekuasaan/*Powercube Theory* yang terdiri dari 7 artikel jurnal yaitu dari Zakaria, Adelia, & Nurlela (2019), Chalik (2017), Fadli, Bailusy, Nas, & Zulfikar

(2017), Chalik (2016), Batubara & Asrinaldi (2018), Nasir (2015), dan Kriyantono, Ramadhan, & Setiawan (2015). *Kedua*, faktor kemenangan petahana dengan 3 artikel jurnal yaitu dari Boro (2010), Hariyanto, Hijjang, Tahir, & Kasnawi (2018), Yusra & Darmawan (2017). *Ketiga*, faktor kegagalan petahana terdiri dari 3 artikel jurnal yaitu dari Abdulrahman (2015), Hidayat, Prasetyo, & Yuwana (2018) serta Yuliati, Raharjo, & Siswantoro (2017). *Keempat*, faktor kemenangan pendatang baru sebanyak 6 artikel jurnal yang ditulis oleh Sanjaya (2017), Hasan, Hasrullah & Sultan (2018), Putri & Qodir (2017), Hertanto & Mulyaningsih (2017), Ratri, Amaliatulwalidin, & Isabella (2019), serta Gunawan, Bainus & Paskarina (2020).

Menurut Zakaria, Adelia, & Nurlela (2019), ditinjau dari perspektif *powercube*, dalam pemilihan kepala desa di Simalungun Sumatera Utara, menghasilkan temuan bahwa dalam pemilihan kepala desa, kekuatan tersembunyi menjadi point penting. Hal tersebut karena tokoh masyarakat yang biasanya menjadi kekuatan tersembunyi memiliki kemampuan untuk memobilisasi massa dalam kampanye.

Menurut Chalik (2017), ditinjau dari perspektif teori *powercube*, dalam pemilu, terutama pilkada di Indonesia, terdapat 3 bentuk kekuasaan yang dapat mempengaruhi kemenangan petahana. Pertama, bentuk kekuasaan yang terlihat (*visible power*). Kedua, bentuk kekuasaan yang tersembunyi (*hidden power*). Ketiga, bentuk kekuasaan yang tidak terlihat (*invisible power*).

Selanjutnya Fadli, Bailusy, Nas, & Zulfikar (2017) lebih memperjelas dimana dalam pilkada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015, keterlibatan elit local cukup berpengaruh dalam peningkatan partisipasi politik. Elit politik lokal mensosialisasikan pasangan calon, menjadi tim kampanye dan tim relawan pasangan calon bupati/wakil

bupati. Tokoh agama menjadi bagian dari penyelenggara Pilkada dan mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada melalui kegiatan keagamaan. Sementara itu, tokoh adat berperan dengan memanfaatkan kharisma yang dimiliki mensosialisasikan informasi Pilkada kepada masyarakat, membangun komunikasi dengan pasangan calon kemudian mendukungnya dalam Pilkada.

Dari penelitian yang dilakukan Chalik (2016) dijelaskan bahwa dalam pemilu kepala daerah di Jawa Timur, kekuasaan petahana dalam mengambil dukungan dari elit local lebih besar dikarenakan biasanya beberapa petahana juga berasal dari kalangan kiai dan santri, sehingga mempermudah akses dalam menerobos jaringan politik hingga di level basis. Dalam konteks teori *powercube*, pada ruang dan eksistensi kekuasaan, elit local yang berbasis pesantren bersinergi dengan kekuatan politik, terutama dalam upaya mendukung petahana untuk kembali menang dalam kontestasi pemilu.

Sejalan dengan penelitian Chalik (2016), Batubara & Asrinaldi (2018) menyatakan bahwa sebagian besar tokoh agama sebagai kekuatan tidak terlihat dalam perspektif *powercube*, dalam hal ini Kyai sering memanfaatkan pola hubungan klientelistik untuk mendukung salah satu calon untuk memenangkan pemilu di Mandailing Natal. Hubungan klientelistik ini termasuk dalam invisible power dalam teori *powercube*. Namun, seperti yang terjadi di Pesantren Mustafawiyah Purba Baru, pola hubungan klientelistik dimanfaatkan hanya untuk meningkatkan partisipasi pemilu tanpa ada tujuan politik tertentu.

Nasir (2015) juga menyebutkan bahwa faktor sosiologis agama dalam hal ini Islam, dan organisasi keagamaan seperti NU, Persis dan Muhammadiyah diyakini memberi pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Kota

Tasikmalaya. Disamping itu, adanya peran Kyai sebagai pemimpin keagamaan yang juga berafiliasi dengan partai politik, cenderung dapat menjaga kestabilan perolehan suara sebuah partai politik.

Menurut Kriyantono, Ramadhan, & Setiawan (2015), media massa menjadi kekuatan tersembunyi dalam pertarungan politik pada Pilkada Jawa Timur tahun 2015. Dalam pemilu tingkat local di Jawa Timur tahun 2015, Penyebaran informasi melalui media telah dicampuri kepentingan lain. kepentingan elit politik dan elit local membumbui penyebaran informasi yang kurang baik sehingga menyebabkan turunnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik terutama dalam pelaksanaan pemilu.

Menurut Boro (2010), menangnya kembali kandidat anggota legislatif petahana di Kabupaten Kupang tahun 2009 dikarenakan dukungan aspek figure kandidat dan aspek partai politik. Hal yang paling urgen adalah kandidat mampu membangun relasi yang baik dengan pemilih yang ditarget sebagai kantong kemenangan tanpa memandang unsur etnis dan agama. Selain itu, kandidat cepat respon terhadap kebutuhan dasar masyarakat pemilih dan kandidat juga konsisten pada janji politiknya. Situasi ini diperkuat dengan partai politik memberi persetujuan/restu politik bagi kandidat legislatif petahana untuk bertarung lagi dalam pemilu.

Menurut Hariyanto, Hijang, Tahir, & Kasnawi (2018), Strategi yang digunakan incumbent dalam mempertahankan kekuasaanya pada pemilukada Sulawesi Barat tahun 2011 antara lain: strategi kampanye berjalan dan manajemen tim yang berhasil berjalan efektif. Kampanye yang berjalan sejak incumbent tercermin dari cara incumbent dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Incumbent di Sulawesi Barat relatif berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi manajemen tim yang sukses adalah cara

informan mengambil tim yang mengkomunikasikan kesuksesannya selama masa jabatan gubernur di periode kedua.

Berbeda dengan temuan-temuan pada penelitian sebelumnya, Yusra & Darmawan (2017) menyatakan bahwa Tindakan manipulasi dilakukan dalam Pilkada Labuhan Batu Selatan 2015, yang bertujuan untuk menggagalkan calon lain sehingga kemenangan petahana lebih mudah diraih karena hanya melawan calon “boneka”, terjadi karena adanya kepentingan memenangkan petahana dan pasangan calon lain dinilai berpotensi menyulitkan petahana jika tidak digagalkan maka caleg lain atau pendatang baru yang akan menang .

Menurut Abdulrahman (2015), terdapat beberapa alasan atas kegagalan caleg petahana pada pileg 2014 di Jawa Tengah, yaitu ketidak mampuan caleg petahana dalam menghadapi kompetisi internal dengan sesama caleg dalam satu partai. Pragmatisme pemilih, penyelenggara pemilu yang kurang profesional merupakan faktor-faktor yang memberikan sumbangan terhadap kekalahan caleg petahana.

Sedangkan Hidayat, Prasetyo, & Yuwono (2018), menyebutkan bahwa kekalahan telak incumbent dalam pilkades di Desa Tanjung membuktikan bahwa penggunaan uang dan penguasaan lembaga negara tidak berbanding lurus dengan banyaknya suara yang diperoleh. Hal ini membuktikan bahwa masih ada hubungan patron-klien yang dapat memengaruhi pemilih di pedesaan. Dalam hal ini, kepala desa terpilih merupakan termasuk golongan elite desa yang berasal dari golongan yang menjaga kesadaran hubungan patron-klien warga dari jasa orang tua terdahulu saat menjabat kepala desa dan Karakter masyarakat di Desa Tanjung yang masih memiliki ikatan dengan nilai-nilai Jawa menjadi salah satu sebab penyebab keuntungan dalam konteks mengambil hati rakyatnya.

Sementara itu, temuan Yuliati, Raharjo, & Siswantoro (2017) dari analisis yang dilakukan pada pemilu tingkat local di Indonesia, menunjukkan bahwa semakin tinggi temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern akan semakin menurunkan peluang keterpilihan petahana dan semakin tinggi skor kinerja pemerintah daerah akan semakin meningkatkan peluang keterpilihan petahana. Sebaliknya, opini audit, temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, serta evaluasi akuntabilitas kinerja tidak berhubungan dengan keterpilihan petahana.

Menurut Sanjaya (2017), dalam pendekatan marketing politik yang digunakan pendatang baru pada pileg di Dapil Lamandau dibagi menjadi tiga yaitu *pull* marketing, *push* marketing dan *pass* marketing. Dalam melaksanakan pendekatan marketing tersebut target utamanya adalah perempuan karena program yang dibawa berkaitan dengan perempuan. Selain menggunakan marketing politik juga menggunakan influencer tokoh yang berpengaruh untuk menarik perhatian masyarakat.

Menurut Hasan, Hasrullah, & Sultan (2018), strategi komunikasi yang dilakukan oleh Tenri Olle Yasin Limpo dan Adnan Purichta Ichsan dalam pilkada Kabupaten Gowa tahun 2015 sebagai wajah baru dalam pilkada adalah diawali dengan mengamati permasalahan, ketokohan dan kelembagaan, perencanaan dan pembuatan program, mengambil tindakan komunikasi dan evaluasi program kerja. Namun, hasil pemilu menunjukkan bahwa Adnan Purichta Ichsan menang sebagai kepala daerah Kabupaten Gowa tahun 2015. Walaupun kategori strategi yang dilakukan mereka sama, namun dalam kategori evaluasi program kerja, Hasan Hasrullah terjadi miss komunikasi dalam tim dan terbatasnya dana. Sementara itu, jaringan komunikasi Adnan Purichta Ichsan dari tingkat kabupaten hingga desa sangat rapi.

Faktor Kemenangan Koalisi sekaligus pendatang baru Suharsono-Halim dalam memenangkan pemilu kepala daerah Kabupaten Bantul tahun 2015 menurut Putri & Qodir (2017) dipengaruhi beberapa factor. Faktor-faktor tersebut yaitu, adanya koalisi partai politik yang telah dibangun oleh partai politik pendukung dan pengusung pasangan, partisipasi politik yang meningkat dibandingkan pada pemilu tahun 2010, dan Modalitas. Modalitas tersebut diantaranya modal politik, modal social modal budaya dan modal ekonomi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Qodir (2017), Hertanto & Mulyaningsih (2017) menyebutkan bahwa kemenangan pendatang baru sekaligus Bupati perempuan pertama di Lampung Chununia Chalim pada Pilkada Lampung Timur tahun 2015 dipengaruhi oleh factor latar belakang keluarga, beliau merupakan keturunan dari kyai besar salah satu pendiri Nahdlatul Ulama di Lampung Timur. Kekuatan figur ini memanfaatkan dukungan dari organisasi masyarakat (ormas) di bidang keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama (NU), kelompok ibu-ibu pengajian (Fatayat), dan Gerakan Pemuda Ansor.

Sedangkan Ratri, Amaliatulwalidin, & Isabella (2017) menyatakan bahwa kemenangan Yan Anton Ferdian sebagai wajah baru di Pilkada Kabupaten Banyuasin tahun 2013 bersumber dari kekuatan dinasti politik yang dimilikinya. Kemenangan tersebut didapat kekuatan modal sosial sang ayah. Modal yang dimiliki oleh Yan Anton Ferdian berupa modal sosial sekaligus simbolik, modal politik dan modal ekonomi. Modal ini kemudian dikembangkan menjadi berbagai strategi. Selanjutnya penerapan strategi tersebut akan mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat Banyuasin berdasarkan pendekatan psikologis, sosiologis dan rasional, sehingga dengan itu dapat memenangkan pemilihan tersebut.

Menurut Gunawan, Bainus, & Paskarina (2020) pada konteks pilkada Bupati dan Wakil Bupati Nagari Raya Tahun 2017, strategi yang digunakan pasangan calon Jamin Idhan dan Chalidin (JADIN) sebagai pendatang baru untuk melawan petahana adalah strategi ofensif. Hal ini dikarenakan Pasangan Jadin mutlak harus melakukan strategi penawaran baru kepada khalayak pemilih di Nagari Raya dalam rangka membuat pemilih berpaling dari sebelumnya mendukung dinasti politik yang dibangun Ampon Bang beralih mendukung mereka. Dengan demikian strategi ofensif seperti perluasan pasar dan menembus pasar dilakukan dalam rangka meraup pemilih yang sebelumnya kerap mendukung dinasti politik petahana. Berikut ini peneliti sajikan taksonomi literature review dalam penelitian ini.

Tabel. 1.2. Ringkasan Literatur Review

No	Jenis	Penulis	Temuan
1.	Teori Kubus Kekuasaan/ <i>Powercube Theory</i>	Zakaria, Adelia, & Nurlela (2019) Chalik (2017) Fadli, Bailusy, Nas, dan Zulfikar (2017) Chalik (2016) Batubara & Asrinaldi (2018) Nasir (2015) Kriyantono, Ramadlan, & Setiawan (2015)	Dalam Teori Kubus Kekuasaan, dimensi bentuk kekuasaan seringkali dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan suara yang lebih terutama bentuk kekuasaan tersembunyi, dan tidak terlihat dengan memanfaatkan pihak-pihak atau kegiatan yang memiliki pengaruh luas terhadap masyarakat, terutama elit agama dan elit local.
2.	Faktor Kemenangan Petahana	Boro (2010) Hariyanto, Hijjang, Tahir, & Kasnawi (2018) Darmawan & Yusra (2017)	Faktor utama yang menjadi faktor kemenangan petahana dalam pemilu adalah dukungan dari partai politik, aspek figure kandidat serta kamoanye berjalan yang dilakukan petahana selama masih memegang jabatan dalam politik.
3.	Faktor Kegagalan Petahana	Abdulrahman (2015) Hidayat, Prasetyo, Yuwana (2018) Yuliati, Raharjo, & Siswanto (2017)	Faktor yang menyebabkan seorang petahana gagal dalam meraih kembali kursi kekuasaan dalam pemilu adalah adanya kompetisi internal sesama caleg, ketidakpuasan pemilih baik terhadap

			kinerja maupun kepribadian calon, buruknya political marketing, patron-klien pendatang baru dan juga adanya isu-isu negative yang berkembang di masyarakat.
4.	Faktor Kemenangan Pendatang Baru	Sanjaya (2017) Hasan, Hasrullah, & Sultan (2018) Putri & Qodir (2017) Hertanto & Mulyaningsih (2017) Ratri, Amaliatulwalidin, & Isabella (2017) Gunawan, Bainus & Paskarina (2020)	Faktor kemenangan pendatang baru didukung oleh marketing politik yang baik dengan cara memetakan segmentasi, targeting dan positioning, kemudian strategi komunikasi yang kompak sampai ke tingkat bawah, hingga modalitas yang cukup, termasuk modal social, budaya, dan ekonomi.

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2020

Berdasarkan kajian diatas, telah dijelaskan oleh beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan teori kubus kekuasaan/*powercube theory*, faktor kemenangan petahana, faktor kegagalan petahana, dan yang terakhir yaitu faktor kemenangan pendatang baru dalam pemilu. Maka untuk membedakan dalam penelitian kali ini, yaitu dimana peneliti sebelumnya belum membahas tentang jatuhnya petahana dan menangnya kandidat baru atau pendatang baru pada pemilu DPR RI. Maka dari itu, penulis lebih memfokuskan penelitian ini pada : **“Jatuhnya Petahana dan Menangnya Pendatang Baru di Pileg 2019: Studi Kasus terhadap Pius Lustrilanang (Caleg Gerindra) dan Dr. Andreas Hugo Pariera (Caleg PDIP) di Dapil NTT 1”**.

F. Kerangka Teori

1. Kubus Kekuasaan (*Powercube*).

Teori *Powercube* (Kubus Kekuasaan menjelaskan tiga dimensi tentang kekuasaan. Yaitu satu dimensi menjelaskan tentang kekuasaan yang hanya berfokus pada satu hal saja, yaitu tindakan para aktor dalam mengambil keputusan, dua dimensi juga masih

berfokus pada kepentingan subjektif dalam bentuk pilihan atau bahkan keluhan, sedangkan tiga dimensi memperhatikan aspek pembuatan kebijakan dalam agenda politik dan sekaligus melihat kontrol terhadap agenda tersebut. Dari teori kekuasaan Tiga Dimensi tersebut kemudian menginspirasi Gaventa untuk menciptakan teori Powercube ini yang menjelaskan kekuasaan sendiri terdiri dari tiga sisi yaitu level, ruang, dan bentuk. Konsep teori Powercube ini sendiri berangkat dari persoalan kekuasaan yang berpengaruh dalam kehidupan manusia, tetapi belum ada sebuah kajian yang mendalam dan bahkan komprehensif tentang kekuasaan itu sendiri.

Secara umum menurut Gaventa J. (2006) kekuasaan mempunyai tiga dimensi (yaitu) : pertama, Dimensi Level (Dimensi Tingkatan), yang terdiri atas: Lokal, Nasional, dan Global. Kedua, Dimensi Space (Dimensi Ruang), yang terdiri atas: Ruang Tertutup (closed), Ruang Yang Diperkenankan (invited), dan Ruang Yang Diciptakan atau Diklaim (claimed/created). Ketiga, Dimensi Forms (Dimensi Bentuk), yang terdiri atas: Bentuk Yang Terlihat (visible), Bentuk Tersembunyi (hidden), dan Bentuk Tidak Terlihat (invisible).

Menurut John Gaventa (2006) Dimensi level atau Dimensi Tingkatan membicarakan tentang level atau tingkatan kekuasaan yang hendak dikaji yang terdiri dari global, nasional dan lokal. Dalam menganalisis level kekuasaan ini, tidak bisa terpisah, sehingga sebuah kekuasaan dalam skala lokal harus meliputi analisis di tingkat nasional bahkan global. Contohnya ketika kita berbicara aspek ekonomi politik pemerintahan lokal, persoalan pengambilan lahan secara paksa oleh pemerintah karena untuk kepentingan ekonomi yang investor utama adalah agen-agen global, tidaklah

cukup hanya membaca realitas politik lokal semata, tapi juga konstelasi politik global dan nasional.

Menurut John Gaventa (2006) terdapat tiga jenis Ruang, yaitu sebagai berikut:

- a. Ruang tertutup (*closed*) adalah ruang dimana ada sekompok aktor atau elite yang difungsikan untuk mengambil keputusan tanpa adanya pihak lain dan tanpa adanya keinginan untuk membuka lebih luas ruang untuk kemungkinan masuknya pihak lain
- b. Ruang tersediakan (*invited*) adalah ruang yang dimana sengaja dibuat oleh para penentu kebijakan baik pada level Negara. Daerah ataupun desa baik yang disahkan secara hukum ataupun tidak dan bertujuan untuk mengundang lebih banyak pihak duduk bersama memutuskan sesuatu, ruang ini diatur untuk kegiatan para kelompok dan untuk konsultasi. Ruang yang diundang dapat diatur artinya masih dilembagakan dalam bentuk konsultasi satu kali.
- c. Ruang terciptakan (*claim*) adalah ruang yang di bangun secara mandiri oleh masyarakat umum yang diakibatkan oleh kekecewaan atas ruang-ruang yang telah tersedia diwilayah mereka untuk berproses keterlibatan atau dibangun secara khusus untuk menyediakan ruang bagi aktivitas mereka sendiri tanpa ada intervensi dari pihak luar. Akan tetapi ruang yang di klaim oleh aktor ini kurang kuat, untuk menciptakan sesuatu yang lebih banyak.

Sedangkan menurut John Gaventa (2006) dimensi forms terbagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Kekuasaan nyata (*visible power*) merupakan Tingkatan yang dapat mencakup beberapa aspek kekuatan yang terlihat seperti, kekuasaan yang diatur secara hukum, memiliki struktur, kewenangan, institusi, dan prosedur dalam pengambilan keputusan secara jelas. Strategi ini, menargetkan untuk mengubah siapa, bagaimana dan apa dari pembuatan kebijakan sehingga proses kebijakan yang terjadi lebih demokratis dan akuntabel dan melayani kebutuhan dan hak-hak masyarakat.
- b. Kekuasaan tersembunyi (*Hidden power*) adalah dimana institusi tertentu yang berkuasa untuk mempertahankan pengaruhnya dengan mengontrol siapa yang dapat mengambil keputusan dalam sebuah agenda.
- c. Kekuasaan yang tak terlihat (*invisible power*) adalah kekuasaan yang paling terdalam dan tidak terlihat, dimana kekuasaan yang tidak terlihat ini, mampu membentuk batasan-batasan proses keterlibatan secara ideologis dan psikologis.

2. Partai politik

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk membela dan memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan juga negara, serta memelihara ketahanan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Miriam Budiardjo, partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang

mana anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama (Budiardjo, 2007).

Menurut (Politik, Pudarnya, & Di, n.d.) Partai politik memiliki konsep dan klasifikasinya antara lain sebagai berikut:

b. Konsep tentang Partai Politik.

Menurut (Politik et al., n.d.) dalam Neumann (1963: 352-353) “secara konseptual partai politik merupakan lembaga artikulatif yang mewakili kepentingan politik masyarakat dengan tujuan untuk mengawasi kekuasaan pemerintah serta berkompetisi untuk meraih suara dan dukungan pemilu”.

c. Klasifikasi Partai Politik.

Menurut (Politik et al., n.d.) Partai politik dapat di klasifikasikan berdasarkan dua hal yaitu berdasarkan orientasi sosio-ideologis dan berdasarkan status kekuatan organisasi partai. Menurut Liddle (2003: 5), Baswedan (2004), Ufen (2006), Mietzner (2013) & (Politik et al., n.d.), ada beberapa klasifikasi spectrum ideology partai politik di Indonesia yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.3 klasifikasi spektrum ideology partai politik di Indonesia

ILMUWAN	BENTANGAN SPEKTRUM IDEOLOGI				
Liddle (2003)	Nasionalis-Soekarno	Universalis	Islam		
Baswedan (2004)	Nasionalis-Sekuler	Islam Fremdly	Islam Inklusif	Islam	
Ufen (2006)	Sekuler	Islam Moderat	Islam moderat	Campuran modernis dan tradisional	Islam modernis
Mietzner (2013)	Sekuler	Ideologi Moderat	Ideologi Moderat	Islam	
(Politik et al., n.d.)	Nasionalis-Sekuler	Nasionalis-Muslim	Nasionalis-Muslim	Nasionalis-Islamis	

Sumber :Al-Hamdi, 2020.

Dari tabel di atas, telah dijelaskan bahwa partai politik dibagi secara ideologis kedalam tiga spectrum yaitu nasionalis-sekuler, nasionalis-Muslim, dan nasionalis-Islamis. Menurut Al-Hamdi, (2020) "Pemilihan tiga klasifikasi tersebut didasarkan pada tiga alasan utama. Pertama, ketiga kekuatan tersebut merepresentasikan tiga varian masyarakat Indonesia akhirakhir ini, yaitu abangan, santri, dan jemaah tarbiyah. Kedua, ketiga kekuatan tersebut merepresentasikan kekuatan utama aspirasi masyarakat baik di tingkat nasional maupun lokal. Ketiga, partai-partai yang berada di dalam ketiga kekuatan politik tersebut telah berpartisipasi sebagai peserta pemilu dan selalu memiliki kursi representasinya secara terus-menerus di parlemen baik di tingkat nasional maupun local".

Hafied Cangara (dalam Labolo dan Ilham, 2015) menarik suatu pemahaman bahwa partai politik mempunyai tiga prinsip dasar, yaitu :

- a. Partai sebagai koalisi, yaitu membentuk koalisi dari berbagai kepentingan guna membangun kekuatan mayoritas.
- b. Partai sebagai organisasi, untuk mampu menjadi institusi yang dimanis, eksis dan berkelanjutan, partai politik harus dikelola. Partai harus dibina dan juga dibesarkan sehingga mampu menjadi menarik dan menjadi wadah perjuangan, sekaligus sebagai representasi dari sejumlah orang ataupun kelompok.
- c. Partai sebagai pembuat kebijakan (*policy making*). Untuk mampu menduduki jabatan-jabatan public, para calon yang diajukan oleh partai politik didukung secara konkret oleh partai politik tersebut. Dari posisi tersebut, partai politik mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi ataupun mengangkat petugas atau karyawan dalam lingkup kekuasaannya, bahkan mampu memberikan pengaruh dalam pengambilan kebijakan di kementerian dimana kader partai menduduki posisi yang sama melalui kolegitas partai.

3. Caleg petahana, Pendatang baru dan Pemilu.

Petahana merupakan pemegang jabatan yang kembali ikut berkontestasi akan mendapat keuntungan dalam sebuah pemilihan umum. Keuntungan yang didapatkan atas kinerja dan pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat sebelumnya. Petahana dalam hal ini mendapatkan beberapa keuntungan seperti: Penguasaan atas data, Penguasaan atas layanan dan Penguasaan atas citra (Nawawi, 2015). Calon legislatif merupakan orang yang mencalonkan diri dalam perebutan kursi legislatif. Sedangkan Pendatang baru merupakan kandidat yang belum mempunyai basis masa pendukung yang fenomena yang mengejutkan para kontestasi pemilu (Hermanto & Mondir, 2020). caleg-caleg muda yang ikut terpilih dalam pemilihan calon legislatif yang memiliki tujuan tertentu, sedangkan pendatang baru adalah kandidat yang baru menempati suatu tempat pada calon legislatif.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Andrew Reynold dalam (Labolo & Ilham, 2015) menyatakan bahwa pemilu merupakan tata cara dimana suara yang didapatkan oleh para kandidat dan partai pada kontestasi dalam memperoleh kursi-kursi dalam dewan perwakilan atau parlemen.

Sistem pemilu merupakan suatu proses menghitung perolehan suara dalam suatu pemilu yang kemudian diubah menjadi kursi-kursi yang dimenangkan oleh peserta pemilu. Rumusan pemilu yang digunakan, stuktur pemungutan suara, dan besaran dapil

atau daerah pemilihan merupakan variable-variabel kunci dalam sistem pemilu. Dalam menghitung perolehan suara dalam suatu pemilu yang kemudian diubah menjadi kursi-kursi di badan legislatif, pemilihan sistem pemilu merupakan hal yang sangat menentukan siapa yang terpilih dan juga partai mana yang akan meraih kekuasaan (Reynolds, Reilly & Allis, 2005). Pemilu memiliki tujuan untuk memilih kepala pemerintahan atau kepala eksekutif dan untuk mensukseskan kebijakan umum yang akan dilaksanakan oleh pemerintah terpilih. Selain untuk memilih kepala eksekutif, anggota legislatif atau parlemen juga dipilih melalui pemilu, dimana parlemenlah yang akan menetapkan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan serta mengawasi kegiatan pemerintah demi kepentingan rakyat (Mahmud, 2018).

Pemilihan umum sebagai lambang dan tolak ukur dari demokrasi yang dianut dan dilaksanakan suatu negara, hal ini merupakan gambaran sistem politik yang digunakan. Dalam ilmu politik, dikenal berbagai macam sistem pemilihan umum beserta variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu *Single-member Constituency* dan *Multi-member Constituency*. Yang disebut dengan *Single-member Constituency* yaitu satu daerah pemilihan atau wilayah distrik memiliki satu wakil, biasanya disebut distrik. Sementara itu, *Multi-member Constituency* adalah satu daerah pemilihan memilih lebih dari satu atau beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau juga disebut sistem proporsional (Hadimin, 2015).

Pelaksanaan pemilihan umum dikenal sebagai kegiatan vital di suatu negara yang dinilai cukup sensitif. Maka dari itu di butuhkan pula sistem yang mampu menyelaraskan pemilihan umum agar tetap demokrasi, akuntabel, serta berkapabilitas mengingat sistem pemilu kerap di salah artikan oleh beberapa pihak. Selain itu, melalui

sistem ini, penyelenggaraan pemilu dapat terkoordinir dengan baik mulai dari keabsahan partai politik, ideologi dan tujuan partai politik, data kandidat anggota partai politik, dan juga mekanisme pemilihan umum (Kansil, 1986).

Sebagai kompetisi politik, terdapat sejumlah aktor yang dilibatkan dalam pelaksanaan pemilu. Masing-masing aktor mempunyai fungsi dan juga posisi tersendiri yang secara bersama memiliki kewajiban menyukseskan pelaksanaan pemilu. Menurut (Sardini, 2011), aktor-aktor tersebut dikelompokkan menjadi :

1. Aktor Utama Pemilu

- a. Pemilih

Dalam konteks Indonesia, diantara aktor-aktor pemilu yang ada, posisi pemilih kerap kali terpinggirkan. Daftar pemilu selalu menjadi kontroversi dalam pelaksanaan pemilu. Padahal, hak-hak politik warganegara telah dijamin dalam konstitusi, termasuk dalam hal itu adalah hak memilih dalam pemilu.

- b. Penyelenggara Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya merupakan penyelenggara pemilu di Indonesia.

- c. Peserta Pemilu

Baik dalam pemilu eksekutif maupun legislative, partai politik selalu menjadi pelaku dominan dalam pelaksanaan pemilu.

2. Aktor Pendukung

- a. Pemerintah

Keberhasilan pemilu sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Misalnya pengiriman logistic pemilu ke tempat pemungutan suara, tidak akan berjalan tepat sasaran jika tidak ada dukungan yang baik dari pemerintah.

b. Lembaga Keamanan

Lembaga keamanan sangatlah penting dalam keberlangsungan pemilu. hal ini karena sangatlah mungkin terjadi pergesekan kepentingan diantara warga masyarakat.

c. Lembaga Penegak Hukum

Lembaga ini bertugas untuk mengontrol jalannya aturan yang sudah disepakati oleh semua pihak, termasuk jika terdapat kecurangan-kecurangan dalam pemilu.

d. Pemantau Pemilu

Pemantau pemilu adalah LSM, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri dan perwakilan negara sahabat yang telah mendaftarkan ke KPU dan telah memperoleh akreditasi untuk melaksanakan kegiatan pemantauan pemilu.

Dari semua aktor pemilu tersebut, haruslah saling bekerjasama untuk menciptakan pemilu yang sesuai dengan UUD 1945, yaitu pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Apabila salah satunya tidak berfungsi dengan fungsinya, maka penyelenggaraan pemilu akan mengalami masalah dan tidak akan berjalan secara maksimal.

G. Defenisi Konsepsioanal.

Suatu istilah dimana untuk menggambarkan suatu keadaan yang dapat diteliti didalamnya serta keadaan suatau individu atau kelompok yang menjadi obejk dari suatau penelitian. Adapun defenisi konsepsional dari penelitian ini antara lain:

1. Kekuasaan kubus (*Powercube*) merupakan Teori yang dapat digunakan untuk memetakan hal-hal yang melatarbelakanginya. Teori ini dapat menganalisa mengapa seseorang mampu memenangkan dan kalah dalam sebuah pertarungan politik. Teori ini juga dapat menganalisa tiga dimensi kekuasaan dari tingkat internasioanl, global dan lokal
2. Partai politik merupakan sarana untuk menghubungkan elit-elit politik lokal untuk mencapai suatau tujuan, dimana partai politik ini adalah organisasi atau lembaga yang memiliki visi-misi dan tujuan yang sama dalam menguasai kekuasaan pemerintah.
3. Pemilu merupakan aktivitas untuk memilih calon legislatif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang disepakati melalui pemberian suara dari rakyat.
4. Petahana merupakan pemegang jabatan atau kandidat yang memiliki kekuasaan untuk ikut berkontestasi kembali dalam sebuah pemihan umum, untuk menduduki kembali jabatannya.
5. Pendaatang baru merupakan kandidat yang belum mempunyai basis masa pendukung dalam kontestasi sebuah pemlihan umum, akan tetapi memiliki potensi untung menduduki jabatan yang ada.

H. Defenisi Operasioanal.

Defenisi operasional sangat penting dalam menentukan indikator untuk menyelesaikan penelitian ini. Dengan adanya defenisi operasioanal ini dapat membantu peneliti dalam menentukan fokus yang ada dalam permasalahan tersebut. Hal ini akan mempermudah peneliti dalam melakukan identifikasi masalah serta penyelesaiannya. Berikut defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, dari teori *powercube*, untuk mendapatkan faktor kemenangan dalam pemilu dengan menggunakan dimensi bentuk adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4. Defenisi Operasional.

No	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Dimensi Bentuk <i>Powercube Theory</i> (Gaventa, 2006)	a. <i>Visibel Power/Kekuatan Terlihat</i>	<ul style="list-style-type: none">- Strategi kampanye kandidat untuk meraih simpati masyarakat melalui jualan program dan <i>branding profile</i> kandidat ke masyarakat atau ke pemilih- Dukungan dari partai- Posisi Koalisi
		b. <i>Hidden Power/Kekuatan Tersembunyi</i>	<ul style="list-style-type: none">- Dukungan dari penyelenggara pemilu (Bawaslu dan KPU serta jajarannya sampai tingkat bawah)- <i>Money Politics</i>.
		c. <i>Invisible Power/Kekuatan Tidak Terlihat</i>	<ul style="list-style-type: none">- Mobilisasi tokoh agama/Priyayi/Pondok Pesantren maupun tokoh masyarakat

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2020

I. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Menurut Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, & Efendi (2020), penelitian kualitatif merupakan sebuah upaya untuk melakukan rasionalisasi dan juga interpretasi atau penafsiran terhadap realitas kehidupan yang didasarkan pada apa yang dipahami oleh

peneliti. Penelitian empiris biasanya melibatkan sejumlah data lapangan/ bukti empiris yang menggambarkan kejadian-kejadian alamiah dan problematis serta makna dari kehidupan masing-masing individu.

Dalam penelitian kualitatif terdapat lima pendekatan yang dapat digunakan yaitu, naratif, fenomenologis, etnografis, grounded theory dan studi kasus. Dari kelima pendekatan tersebut, pendekatan studi kasus merupakan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut karena pendekatan studi kasus sangat relevan dengan topic yang peneliti ambil. Secara definitive, studi kasus adalah jenis pendekatan untuk menyelidiki serta memahami satu, dua atau lebih dari kasus sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dibatasi oleh ruang/tempat dan waktu serta pengumpulan sumber datanya melibatkan banyak pihak supaya didapatkan pemahaman yang mendalam dan juga komperhensif (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, & Efendi, 2020). Studi kasus dalam penelitian ini ialah Jatuhnya Petahana dan Menangnya Pemandang Baru di Pileg 2019: Studi Kasus terhadap Pius Lustrilanang (Caleg Gerindra) dan Dr. Andreas Hugo Pariera (Caleg PDIP) di Dapil NTT 1.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan atau pihak-pihak yang terkait dengan topic yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian ini data didapatkan dari caleg pemandang baru yang berhasil merebut kursi legislative pada pemilu 2019 di Dapil NTT 1 yaitu,

Bapak Dr. Andreas Hugo Pariera yang berasal dari Partai politik PDI-Perjuangan (PDIP) serta tim sukses dari Bapak Dr. Andreas Hugo pariera.

a. Data Skunder

Data skunder merupakan data yang diperoleh dari data kepustakaan (*liberary research*) dengan menggunakan data yang tersedia yang berupa bahan-bahan pustaka seperti buku ilmiah, jurnal, undang-undang, artikel dan lain sebagainya yang dianggap relevan dengan topic penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi yang terjalin antara pewawancara atau biasa disebut *interviewer* dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai/*interviewee* yang dilakukan melalui komunikasi langsung tatap muka ataupun secara daring atau online (Yusuf, 2014 : Al-Hamdi, et al, 2020). Adapun dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan narasumber :

1. Caleg Petahana Gerindra yang gagal dalam pemilu 2019 dan caleg pendatang baru PDI-Perjuangan dalam pemilu 2019 dapil NTT 1.
2. Tim sukses Caleg Petahana Gerindra yang gagal dalam pemilu 2019 dan tim sukses pendatang baru PDI-Perjuangan dalam pemilu 2019 di Dapil NTT 1.

b. Teknik Studi Dokumentasi

Dalam Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, dan Evendi (2020), dijelaskan bahwa teknik studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Hal ini disebabkan karena data berupa dokumen juga menyimpan informasi penting dan fakta yang dapat dimanfaatkan sebagai tambahan data dalam penelitian kualitatif. Teknik dokumentasi harus dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan data hingga pengelolaan data untuk mendapatkan hasil yang dibutuhkan dalam penelitian. Dokumen juga dapat berupa buku-buku, jurnal, atau gambar.

4. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimana penelitian ini akan menjelaskan dari pembahasan yang universal ke pembahasan yang lebih spesifik. Menurut (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, & Efendi, 2020) dalam (Bogdan dan Biklen, 2007) analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari teknik pengumpulan data seperti hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan lainnya. Menurut (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, & Efendi, 2020), Proses analisis data kualitatif dapat dilakukan melalui empat tahapan, yaitu:

a. Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pada tahap ini, setelah selesai pengumpulan data baik dari dokumentasi dan wawancara, data-data akan dipilih dan dipilah berdasarkan indikator atau alat ukur yang sudah ditentukan sebelumnya.

b. Seleksi Data

Pada bagian ini peneliti akan, mengelompokkan data sesuai ketgori yang telah di tentukan sebelumnya.

c. Analisis antar-variabel dan Verifikasi data

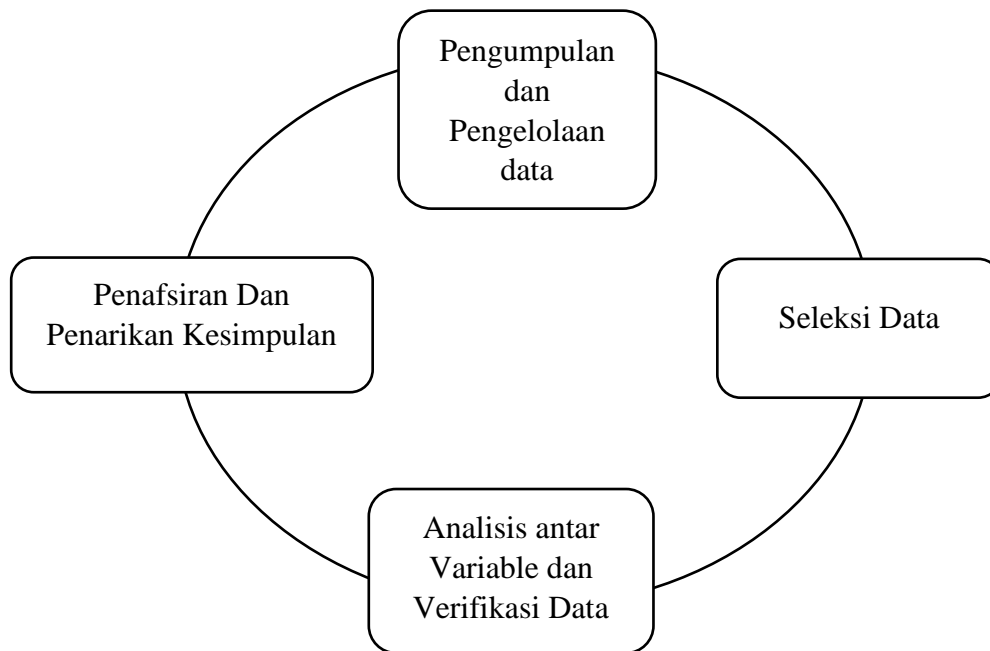
Pada bagian ini, peneliti mengaitkan temuan satu variable atau indicator dengan variable atau indicator lainnya.

d. Penafsiran dan Kesimpulan.

Pada tahap ini, peneliti menyajikan kepada pembaca dan merumuskan kesimpulan atas data-data yang telah ada, dari semua proses yang telah di lalui.

Langkah-langkah dalam analisis data menurut Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, dan Evendi (2020), dapat digambarkan dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1.1 Empat Langkah dalam Analisis Data



Sumber : Penelitian Kualitatif (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, Efendi, 2020).

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan kemudahan dalam pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terencana yaitu :

Bab I, Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Defenisi Konsepsional, Defenisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Gambaran Objek penelitian. Dalam bab ini akan di bahas tentang profil Andreas Hugo Pariera dan Pius Lustrilanang serta di Dapil NTT 1.

Bab III, Pembahasan. Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian mengenai Jatuhnya Petahana dan Menangnya Pemandang Baru di Pileg 2019: Studi Kasus terhadap caleg Gerindra dan Caleg PDIP untuk DPR RI dapil NTT I.

Bab IV, Penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

